

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu kewajiban. Kewajiban tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada masyarakat. Salah satu wujud pertanggungjawaban yang dapat dilakukan adalah pertanggungjawaban melalui laporan keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara serta undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan dokumen penting berisi catatan perusahaan baik transaksi maupun kas. Sebuah laporan memiliki nilai sehingga bermanfaat bagi penggunaannya menandakan laporan keuangan tersebut berkualitas. Dalam hal ini laporan keuangan haruslah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut UU 71 tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan yang disajikan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Laporan keuangan akan bermanfaat bagi pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan,

andal dan dapat diperbandingkan. Namun ada juga laporan keuangan yang tidak menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jika terlalu banyak informasi yang tidak penting maka informasi yang sudah ada menjadi tidak signifikan dan sulit dipahami (Dewi, dkk, 2014). Salah satu sistem yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern.

Menurut (Michaela, 2010) pengendalian intern adalah proses pada organisasi dalam mengecek ketelitian, keakurasian, efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi dan berguna bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti serta mencegah kecurangan dan mengamankan kekayaan perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan (Mulyanto, 2013) COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian intern berada pada manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Menurut (Renaldo, 2016) menjelaskan bahwan sistem pengendalian intern memiliki lima komponen yaitu :

1. Lingkungan pengendalian.
2. Penilaian risiko.
3. Aktivitas pengendalian.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan.

Suatu struktur pengendalian intern dapat berfungsi dengan baik apabila menerapkan kelima komponen tersebut. Struktur pengendalian intern yang tidak memadai akan mengalami kekeliruan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat diandalkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu;

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan berbekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Hal ini merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi tersebut.

2. Teknologi Informasi.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang membantu pengguna untuk menciptakan, menyimpan, mengubah dan menyebarkan informasi. Faktor ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan.

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan.

Sistem keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat digunakan secara manual atau menggunakan komputer dan harus sesuai dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

#### 4. Komitmen Organisasi.

Komitmen organisasi merupakan tingkat keberpihakan karyawan pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen organisasi yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dan menjadi lebih baik, sedangkan komitmen organisasi yang rendah menjadikan individu lebih mementingkan kepentingan pribadi.

Menurut (Badu dkk, 2019) dalam penelitian berjudul “***Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan dan Struktur Organisasi***” komitmen adalah tingkatan seseorang pada sebuah organisasi dimana ingin berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Pemilihan-pemilihan variabel yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Menurut penelitian (Soimah, 2014) dengan judul “***Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara***” menyatakan bahwa secara parsial kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara. Tingginya penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam sistem pengendalian

intern pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Widari, Sutrisno 2017) dengan judul “*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*” menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis kemudian mengambil judul tentang :  
**Pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor (BPKAD) kabupaten kupang.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Kabupaten Kupang.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Kabupaten Kupang?

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Kabupaten Kupang?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Kabupaten Kupang.
2. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Kabupaten Kupang.

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian yang dapat dipaparkan yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki kajian yang sama yaitu; Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan acuan untuk dijadikan pertimbangan bagi kantor BPKAD Kabupaten Kupang guna meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan.